

DATA POKOK IKPD TW IV 2025

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	JENIS DATA	KODE	DEFINISI	RUMUS	TABEL	ANALISIS	DATA DUKUNG
1.	Jumlah kejadian konflik SARA (IUP)	IUP	V	V	V	V	V
2.	Indeks Harmoni	IKD8	V	V	V	V	V
3.	Nilai IKM Perangkat Daerah	IKUPD	V	V	V	V	V
4.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	IKUPD	V	V	V	V	V
5.	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	IKUPD	V	V	V	V	V
6.	Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti	IKUPD	V	V	V	V	V
7.	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	IP	V	V	V	V	V
8.	Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	IP	V	V	V	V	V
9.	Persentasae ormas yang mendapat pembinaan	IP	V	V	V	V	V
10.	Jumlah kejadian konflik SARA	IP	V	V	V	V	V
11.	Persentase koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat	IP	V	V	V	V	V

1. JUMLAH KEJADIAN KONFLIK SARA (IUP)

Definisi operasional Jumlah Kejadian Konflik SARA yaitu banyaknya benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu yang didasarkan pada sentimen indentitas yang menyangkut keturunan, agama, kesukuan dan golongan.

Jumlah kejadian konflik SARA adalah ukuran yang digunakan untuk memantau hubungan antar sesama umat beragama yang dilandasi pada toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai sehingga dapat membentuk hubungan berbangsa dan bernegara dengan baik dan dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan. Tidak adanya kejadian konflik SARA maka dapat diinterpretasikan bahwa telah tingginya tingkat toleransi dan upaya dalam deradikalisasi telah berhasil.

Rumus perhitungan kejadian sara di dapat dari Jumlah kejadian yang berkaitan dengan suku, agama ras dan antar golongan.

Tabel 1.1
Jumlah Kejadian Konflik SARA Triwulan IV Tahun 2025

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Target Jumlah kejadian konflik SARA	n.a	n.a	n.a	n.a	8	8
2	Jumlah kejadian konflik SARA tahun N	n.a	n.a	n.a	n.a	2	2
3	Persentasae	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2025

Tabel 1.2
Data Dukung Uraian Kejadian Konflik Sara Yang Terjadi

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN	KETERANGAN	
			SELESAI	BELUM SELESAI
1	Konflik Internal GPDI Ngadirejo terkait dualisme kepemimpinan di GPDI Ngadirejo sejak Februari 2025	Diskusi Langkah Penyelesaian Kasus Gereja GPDI Ngadirejo dengan Rumah Ibadah Ngadirejo tanggal 26 Februari 2025 bertempat di Sekretariat FKUB Kab. Temanggung		v
	Permasalahan internal Jamaat Gereja Pathekosta di Indonesia (GPDI) Gosyen Kec.Kaloran Kab.Temanggung	Mediasi antara Pemkab Temanggung dengan Pihak Gereja dan bersepakat untuk menggunakan gedung gereja yang sudah di jadwalkan	v	

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2025

Jumlah Kejadian Konflik Sara pada tahun 2025 dari TW 1 sampai TW IV hanya ada 2 Konflik Sara yaitu Konflik Internal GPDI Ngadirejo terkait dualisme kepemimpinan di GPDI Ngadirejo sejak Februari 2025 sampai sekarang Belum Selesai dan belum ada titik temu / jalan keluar.

Jumlah kejadian konflik SARA merupakan IUP yang dihitung dengan target menurun mulai tahun 2025 s.d 2045. Dengan target akhir 0 (nol) kejadian pada tahun 2045.

Faktor pendorong dalam menekan jumlah kejadian konflik SARA yaitu adanya edukasi dan pemahaman tentang keberagaman, penguatan sikap toleransi dan saling menghormati, penegakan hukum yang tegas, penerapan pendidikan karakter, serta pemeliharaan persatuan dan kesatuan.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menekan konflik SARA :

1. Melaksanakan monitoring dinamika situasi sosial politik ekonomi dan keamanan daerah
2. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat
3. Mewujudkan interaksi sosial melalui kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan guna harmonisasi elemen masyarakat
4. Penguatan koordinasi antar kelembagaan baik lembaga vertikal maupun horisontal
5. Pemberdayaan komunitas intelijen daerah

2. INDEKS HARMONI

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) merupakan alat ukur yang dikembangkan untuk memahami, memantau, dan meningkatkan harmoni sosial di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil *Preliminary Study* Tim Peneliti IHaI, dan kemudian dilakukan *Expert Group Discussion* (EGD), Uji Publik dan Sosialisasi, ada 4 (empat) dimensi yang diukur dalam IHaI Tahun 2025 : Dimensi Ekonomi, Dimensi Sosial, Dimensi Budaya, dan Dimensi Keberagamaan. IHaI kemudian diuraikan menjadi 8 (delapan) variabel yaitu Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan; Peningkatan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan; Penguatan Kehidupan Sosial yang Harmonis; Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Komunitas Marginal; Pelestarian dan Penguatan Nilai Budaya Lokal; Penguatan Akulturasi dan Keberagaman Budaya, Moderasi Beragama dan Toleransi Antarumat Beragama, Penguatan Nilai-Nilai Keberagamaan dalam Kehidupan Sehari-hari.

Rumus IHaI dihitung menggunakan riset publik dengan pendekatan Wellbeing Metodologi yang melibatkan survei, pengumpulan data dari berbagai

daerah (20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung), dan analisis mendalam oleh tim penyusun yang melibatkan pakar dan instansi terkait seperti Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BANKESBANGPOL).

Penghitungan Indeks Harmoni dilaksanakan oleh Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial Danbudayadirektorat Jenderal Politik Dan Pemerintahan umum kementerian Dalam Negeri pada tahun 2025

Tabel 2.1 SKOR INDEKS HARMONI
Triwulan IV Tahun 2025

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Target Skor IHal	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	6,72
2	Realisasi Skor IHal	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	6,72
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100%

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2025

Tabel 2.2
Tabulasi Data Hasil IHal Tahun 2025 Kabupaten Temanggung

	Skor IHal 2025 : Direct Measurement																								
	Riset Publik Indeks Harmoni (IHal)2025 : Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah (Data 3-24 Maret 2025)																								
	Dimensi Ekonomi					Dimensi Sosial					Dimensi Budaya					Dimensi Keberagamaan									
	Varabel X1(15,0%)	Varabel X2 (15,0%)	Varabel X3 (11,5%)	Varabel X4 (11,5%)	Varabel X5 (11,0%)	Varabel X6 (11,0%)	Varabel X7 (12,5%)	Varabel X8 (12,5%)																	
No. Responder	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X3.1	X3.2	X3.3	X4.1	X4.2	X4.3	X5.1	X5.2	X5.3	X6.1	X6.2	X6.3	X7.1	X7.2	X7.3	X8.1	X8.2	8.3	
1	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7
2	5	5	6	6	5	6	6	7	8	6	6	6	6	5	7	4	5	5	8	6	7	7	7	8	8
3	7	7	7	4	4	4	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
4	7	6	5	6	6	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
5	6	6	6	6	7	6	6	6	7	6	6	6	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	7	6	6
6	4	1	5	5	3	1	5	3	1	4	4	2	3	3	3	2	2	3	2	3	4	2	3	4	4
7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
9	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
10	6	7	7	7	8	7	8	7	8	7	8	7	7	7	8	7	7	7	7	7	8	8	7	7	7
11	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1271	5	9	7	4	6	5	6	7	6	7	7	6	7	8	6	7	7	6	6	7	7	8	7	7	7
1272	6	7	6	6	6	6	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1273	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1274	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1275	5	5	5	6	6	6	8	8	7	8	8	3	7	6	6	6	6	7	6	8	7	7	8	8	8
1276	7	7	7	7	8	8	8	7	8	7	8	8	7	8	8	7	8	8	8	7	8	8	8	8	8
1277	8	8	8	7	7	8	8	8	8	7	8	8	8	8	8	7	8	7	8	8	8	8	8	8	8
1278	3	5	1	5	4	3	7	7	6	5	5	5	8	8	8	8	7	7	7	8	8	8	8	8	8
1279	7	7	5	7	9	5	6	7	6	8	8	9	7	6	6	5	6	6	7	9	9	6	7	6	6
1280	6	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
1281	7	9	7	7	9	5	7	7	5	7	8	7	8	9	9	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8
1282	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	5	8	7	8	8	7	8	8	8	8	8	7	7	7
1283	7	8	8	7	8	6	7	8	9	7	7	7	8	8	7	7	7	7	8	8	7	7	7	7	7
1284	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skor PPA Var.	6,39	6,70	6,26	6,36	6,67	6,21	6,73	6,94	6,66	6,53	6,81	6,50	6,78	6,93	6,73	6,65	6,80	6,63	7,00	7,15	6,94	6,97	7,12	6,95	6,95
StanDev	1,70	1,68	1,70	1,70	1,70	1,70	1,66	1,66	1,66	1,69	1,60	1,60	1,66	1,63	1,58	1,63	1,61	1,56	1,77	1,69	1,66	1,72	1,63	1,60	1,60
Skor Var Xi	6,46		6,42		6,79		6,63		6,82		6,70		7,04		7,02										
Skor Dimensi t	6,44					6,71					6,76					7,03									
Skor IHal 2025	6,72																								

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2025

Pada Tahun 2025 Skor Indeks Harmoni di Kabupaten Temanggung adalah 6,72

Faktor Pendorong harmoni antarumat beragama yaitu telah terbina sinergitas yang baik antara pemerintah dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh lintas etnis sehingga stabilitas sosial dapat tetap terjaga, dan nilai toleransi yang sudah baik dapat terus diperkuat.

Upaya menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama tetap menjadi prioritas utama. Keberagaman agama di Kabupaten Temanggung harus terus dijaga melalui dialog lintas agama, penguatan nilai-nilai kebersamaan, serta kebijakan inklusif yang memastikan semua kelompok masyarakat merasa dihormati dan dilibatkan. Pemerintah Daerah perlu mendorong peningkatan peran tokoh agama dalam membangun solidaritas sosial, serta mengantisipasi potensi konflik dengan mekanisme deteksi dini.

3. NILAI IKM PERANGKAT DAERAH

IKM perangkat daerah menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik, mengidentifikasi kelemahan, dan merumuskan kebijakan guna meningkatkan kualitas pelayanan di masa yang akan datang. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang didalamnya mengatur unsur-unsur yang harus ada pada keusioner survei, kemudian data diolah sesuai ketentuan.

Rumus Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari nilai survei kepuasan masyarakat (SKM) unit pelayanan dikalikan dua puluh lima

Tabel 3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat
Triwulan IV Tahun 2025

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Target Nilai IKM	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	86,95
2	Realisasi Nilai IKM	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	84,175
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	96,80

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2025

Tabel 3.1 PENGOLAHAN DATA
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PER RESONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN
UNTUK PELAYANAN BANKESBANGPOL KAB.TEMANGGUNG

NO RESPONDEN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	
3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
6	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
8	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
9	3	4	4	4	3	3	3	3	4	
10	4	3	3	4	4	4	4	4	4	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
12	3	3	2	4	3	3	3	3	4	
13	3	3	4	2	3	3	3	3	4	
14	3	3	3	3	3	3	4	4	4	

15	3	4	4	2	3	3	3	2	3	
16	4	3	3	4	4	4	4	4	4	
17	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
18	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
19	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
20	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
21	3	3	4	4	3	3	3	3	3	
Σ Nilai/ Unsur	66	66	67	74	66	67	68	65	80	
NRR/ Unsur	3,14	3,14	3,19	3,52	3,14	3,19	3,24	3,10	3,81	
NRR Tertimbang/ Unsur	0,3489	0,3489	0,3541	0,3911	0,3489	0,3541	0,3594	0,3436	0,4229	3,27185714
IKM Unit Pelayanan										81,7964286

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2025

Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang

=

jumlah bobot

jumlah unsur

=

1

X

=

N

N = bobot nilai per unsur

Contoh : jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur maka:

Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang

=

jumlah bobot

jumlah unsur

=

1

9

=

0,111

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit pelayanan (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,0644	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Tabel 3.2 menunjukan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Bankesbangpol mulai tahun 2020 s.d 2024 *not available*, dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator baru dan baru dilakukan survei kepuasan masyarakat pada tahun 2025. Hasil nilai IKM yang diperoleh pada akhir triwulan IV tahun 2025 dengan angka 84,175. Tahun 2025 menjadi titik penting untuk menyusun metodologi, instrumen survei, dan mekanisme evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan Bankesbangpol.

Hasil penilaian SKM ada pada tabel di bawah ini:

Pada tahun 2025, nilai IKM Bankesbangpol menetapkan target nilai 86,95 sebagai baseline awal. Dengan nilai realisasi IKM 84,175 maka capaian kinerja IKM tahun 2025 pada triwulan 4 ini sudah tercapai 96,80%.

Faktor pendorong capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah kualitas layanan Badan Kesbangpol yang semakin baik dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan pendaftaran Organisasi Masyarakat, didukung dengan kemudahan dalam mengakses pendaftaran Organisasi masyarakat dan skill karyawan yang mumpuni.

Faktor penghambat capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap layanan Ormas,Izin

penelitian dan Wawasan kebangsaan dan SDM Pelayanan yang terbatas/merangkap tugas lain.

Upaya dalam mencapai Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan semakin meningkatkan pelayanan baik melalui tatap muka maupun melalui media, dengan selalu bersikap ramah dan memberikan pelayanan cepat.

4. NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH

Nilai AKIP merupakan Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol pada n-1. Menilai dan mengevaluasi dokumen perencanaan Kinerja, dokumen pengukuran Kinerja, dokumen Pelaporan kinerja, dan Evaluasi internal berdasarkan kriteria yang ada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap setahun sekali.

Rumus AKIP DI dapat dari hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh KemenpanRB atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 4.1 Nilai AKIP Perangkat Daerah
Triwulan IV Tahun 2025

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Target Nilai AKIP	n.a	n.a	n.a	-	-	71,50
2	Realisasi Nilai AKIP	n.a	64.42	67,93	69,35	70,20	77,80
3	Persentase	n.a	n.a	n.a	-	-	100%

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2025

Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Komponen Yang dinilai	Bobot	Nilai	
		2024	2025
a. Perencanaan Kinerja	30	21	24,3
b. Pengukuran Kinerja	30	21	22,5
c. Pelaporan Kinerja	15	13,2	13,51
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15	17,5
Nilai Hasil Evaluasi	100	70,20	77,8
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Nilai AKIP Bangkesbangpol Kabupaten Temanggung dalam periode 2020 hingga Triwulan IV Tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, nilai yang diperoleh sebesar 64,42 yang masih berada pada kategori “B (Baik)”. Namun, pada tahun 2021 terjadi lonjakan menjadi 67,93, sehingga masuk kategori “B (Baik)”.

Peningkatan berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian 71,40, pada tahun 2023 terjadi lonjakan menjadi 69,35 sehingga katagorinya masih “B (Baik)”. Tahun 2024 kembali menunjukkan sedikit kenaikan menjadi 70,20, menandakan adanya perbaikan meskipun relatif stabil dengan katagori nilai “BB (Sangat Baik)”.

Capaian paling tinggi ditunjukkan pada Triwulan III Tahun 2025 dengan nilai 77,80, yang tetap berada dalam kategori “BB (Sangat Baik)”, namun semakin mendekati ambang kategori “A (Memuaskan)”.

Faktor pendorong tercapainya nilai AKIP Perangkat Daerah adalah adanya kordinasi dan kolaborasi antar bidang dalam pengumpulan data kegiatan, keselarasan Dokumen Perencanaan perangkat daerah, adanya tindak lanjut hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.

Faktor penghamabat tercapainya nilai AKIP Perangkat Daerah adalah belum optimalnya pengolahan data kinerja, Keterbatasan SDM dan Kopetensi dan minimnya pemanfaatan teknologi di berbagai bidang.

Upaya dalam meningkatkan nilai AKIP Perangkat Daerah adalah dengan memperbaiki perencanaan kinerja yang selaras dengan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, , serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

5. PERSENTASE TERTANGANINYA KONFLIK DI MASYARAKAT

Konflik adalah Perseteruan dan / atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional (Bidang Kesatuan Bangsa, Bankesbangpol 2024). Dalam penanganan konflik di masyarakat perlu diwaspadai potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum yang dapat berupa aksi unjuk rasa atau demonstrasi, serta munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau benturan suku agama dan ras.

Persentase tertanganinya konflik di masyarakat dihitung dengan rumus

jumlah konflik yang tertangani dibagi jumlah konflik keseluruhan dikali 100%.

**Tabel 5.1 Persentase tertanganinya konflik di masyarakat
Triwulan IV Tahun 2025**

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2024	2025
1	Jumlah konflik yang tertangani	1	0	8	0	4	3
2	Jumlah konflik keseluruhan	1	0	8	0	4	3
3	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	100	100	100	100	100	100

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2025

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025 ada 3 konflik yang tertangani, dengan data konflik sebagai berikut.

Tabel 5.2 Matrik Konflik Kabupaten Temanggung

NO	WAKTU	URAIAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN	KET	
				S	BS
KONFLIK SOSIAL					
1	Juli 2025	NIHIL	NIHIL		
2	Agustus 2025	NIHIL	NIHIL		
3	September 2025	1. Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Rakyat Kecil Temanggung sebagai bentuk solidaritas terhadap insiden yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2025 di Jakarta pada tanggal 01 September 2025 di Depan Gedung Kantor DPRD Kab. Temanggung.	Massa Aksi yang menjadi provokator telah diamankan oleh Polres Temanggung	S	
		2. Kegiatan Silaturahmi dari Sopir Trayek wilayah Temanggung dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tanggal 23 September 2025 di Gedung Pemuda Temanggung	Aspirasi dari para sopir diterima oleh Bupati dan Jajaran Forkopimda Temanggung untuk ditindak lanjuti	S	
4	Oktober	NIHIL	NIHIL		
5	November	NIHIL	NIHIL		
6	Desember	1. Permasalahan internal Jamaat Gereja Pathekosta di Indonesia (GPDI) Gosyen Kec.Kaloran Kab.Temanggung	Mediasi antara Pemkab Temanggung dengan Pihak Gereja dan bersepakat untuk menggunakan gedung gereja yang sudah di jadwalkan	S	

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2025

Faktor pendorong tercapainya indikator persentase tertanganinya konflik di masyarakat adalah adanya sinergitas tim kewaspadaan dini daerah untuk pengawasan sehingga sebelum konflik terjadi telah diadakan mediasi dan musyawarah. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah; serta pengoptimalan tim kewaspadaan dini daerah.

6. PERSENTASE POTENSI KONFLIK YANG DITINDAKLANJUTI

Potensi konflik adalah kemungkinan terjadinya konflik yang sebenarnya, yang berasal dari adanya perbedaan, ketegangan, atau perselisihan antar individu atau kelompok dalam masyarakat.(Bidang Kesatuan Bangsa, 2025) Potensi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti perbedaan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan kurangnya komunikasi. Identifikasi potensi konflik sangat penting untuk melakukan upaya pencegahan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi konflik terbuka yang mengancam keamanan dan stabilitas.

Persentase Potensi Konflik yang ditindaklanjuti dihitung dengan rumus jumlah potensi konflik yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah data konflik yang masuk.

Tabel 6.1 Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti
Triwulan IV Tahun 2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2024	2025
1	Jumlah data potensi konflik yang ditindaklanjuti	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	8
2	Jumlah data konflik yang masuk	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	8
3	Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2025

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 ada 8 konflik yang ditindaklanjuti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (matrik konflik terlampir).

Faktor pendorong indikator potensi konflik yang ditindaklanjuti yaitu terjalin kerjasama yang baik dalam pencegahan dini, identifikasi, dan mediasi terhadap segala macam isu/laporan yang memicu timbulnya konflik

Upaya dalam presentase potensi konflik yang ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi meredam potensi konflik, membangun sistem deteksi dini pencegahan timbulnya konflik.

Tabel 6.2 POTENSI KONFLIK KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

NO	URAIAN	TINDAK LANJUT PENANGANAN
1	Konflik Internal GPDI Ngadirejo terkait dualisme kepemimpinan di GPDI Ngadirejo	• Diskusi Langkah Penyelesaian Kasus Gereja GPDI Ngadirejo dengan Rumah Ibadah Ngadirejo tanggal 26 Februari 2025 bertempat di Sekretariat FKUB Kab. Temanggung
2	Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Rakyat Kecil Temanggung sebagai bentuk solidaritas terhadap insiden yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2025 di Jakarta pada tanggal 01 September 2025 di Depan Gedung Kantor DPRD Kab. Temanggung.	• Massa Aksi yang menjadi provokator telah diamankan oleh Polres Temanggung.
3	Kegiatan Silaturahmi dari Sopir Trayek wilayah Temanggung dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada tanggal 23 September 2025 di Gedung Pemuda Temanggung	• Aspirasi dari para sopir diterima oleh Bupati dan Jajaran Forkopimda Temanggung untuk ditindak lanjuti
4	Terkait Isu-isu yang berkembang terkait Program MBG yang terjadi di beberapa wilayah Temanggung belum tercover semua, bahkan ada isu anak SD keracunan	• Monitoring dan evaluasi Program MBG
5	Terkait Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Bawen-Jogya yang terletak di wilayah Kecamatan Pringsurat (Dsn. Kaliampo Desa Kebumen) belum ada kesepakatan	• Sudah ada beberapa kali Rapat/Audiensi, • Pemerintah Daerah telah memfasilitasi penyelesaian dengan mengundang pihak-pihak terkait seperti Pemilik tanah, agraria, dinpermades, BPKPAD, DPUPR, Kantor Pertanahan dengan pihak pengelola jalan Tol untuk memperoleh kesepakatan ganti rugi. • Perkembangan terakhir Wakil Bupati Temanggung telah melakukan rapat dengan DPR RI Momisi V dan Gubernur Jateng pada tanggal 25 Juli namun belum ada titik temu.
6	Tekait dengan pertembakauan bahwa hasil tembakau di Wilayah Temanggung belum terserap semuanya pada Pabrik Rokok	• Bupati Temanggung beserta Forkopimda telah melakukan kunjungan ke sejumlah gudang perwakilan pabrikan rokok di Kabupaten Temanggung antara lain PT Djarum di Kopen, Kec. Pringsurat, Pena Mas di Lungge dan PT Wismilak Inti Makmur di Tlogorejo untuk berkomunikasi dengan owner beberapa pabrikan yang membeli tembakau di Temanggung.
7	Terkait dengan Bidang Sosial Kemasyarakatan dan ketertiban Umum masih dijumpai pengamen jalanan, Badut, anak punk dan manusia silver di trafic light dan masih dijumpai kesemrawutan pedagang kaki lima maupun parkir sembarangan di Pasar kliwon Temanggung	• Sudah dilakukan penertiban namun masih sering muncul sehingga perlu ada ketegasan sanksi hukum, belum ada pengamanan secara permanen sehingga menimbulkan keresahan pengguna jalan
8	Konflik internal gereja GPDI Gosyen Kecamatan Kaloran pada bulan Desember	• Sudah dimediasi

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2025

7. PERSENTASE PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan adalah ukuran tingkat keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh BANKESBANGPOL dalam menanamkan, memperkuat dan membudayakan nilai-nilai Pancasila serta meningkatkan wawasan kebangsaan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Temanggung.

Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dihitung dengan rumus jumlah masyarakat yang meningkat pemahaman wawasan kebangsaan dibagi jumlah masyarakat yang diberi pembinaan dikali 100%.

Tabel 7.1 Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan Triwulan IV Tahun 2025

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah masyarakat yang meningkat pemahaman wawasan kebangsaan	n.a	n.a	n.a	n.a	863	1102
2	Jumlah masyarakat yang diberi pembinaan	n.a	n.a	n.a	n.a	350	1102
3	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2025

Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan pada Triwulan VI tahun 2025 sebesar 100%.

Pembinaan wawasan kebangsaan dilaksanakan pada:

1. Pada tanggal 13 Maret 2025 dilaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan. Jumlah masyarakat yang meningkat pemahaman wawasan kebangsaan dilihat dari jumlah orang yang lolos dalam Tes wawasan kebangsaan. Dari 281 orang yang mendapat wawasan kebangsaan, yang meningkat pemahaman wawasan kebangsaannya sebanyak 274 orang (274 orang tersebut lolos dalam tes wawasan kebangsaan).
2. Pada tanggal 1 Juni 2025 Pelaksanaan Diskusi Publik Hari Lahir Pancasila (Seminar Nasional dalam rangka Hari Lahir Pancasila) dengan peserta 500 orang.
3. Pada tanggal 14 Juni 2025 Pelaksanaan Penyampaiaan Wawasan Kebangsaan dengan Tema Pembumian Nilai-nilai Pancasila sebanyak 50 orang
4. Pada tanggal 18 Juni 2025 Pelaksanaan Penyampaian Wawasan Kebangsaan di hadiri oleh 25 orang guru Pembina tingkat SLTP yang berasal

- dari kecamatan Bulu, Parakan, Ngadirejo, Bejen, Tretep, dan Wonoboyo.
- 5. Pada tanggal 26 Juni 2025 Pelaksanaan Penyampaian Wawasan Kebangsaan Pada Peringatan Hari Anti Narkoba di Kantor BNN Temanggung sejumlah 150
 - 6. Pelaksanaan Penyampaian Wawasan Kebangsaan Pada Paskibraka sejumlah 50 orang pada Juli 2025
 - 7. Pada Tanggal 27 – 28 Oktober 2025 Pelaksanaan Studi Banding Purna Paskibraka sebanyak 53 Orang.

Faktor pendorong persentase penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan adalah banyaknya kegiatan yang mendukung dalam menyampaikan wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan adalah dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat melalui event-event sosialisasi yang ada.

8. PERSENTASE PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pada Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah.

Rumus Persentase pelaksanaan pendidikan politik dihitung dengan rumus Jumlah pendidikan politik yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah pendidikan politik yang direncanakan dikali 100%.

Pelaksanaan pendidikan politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan wujud pengembangan demokratisasi. Berikut ini kami sajikan pelaksanaan kegiatan Pendidikan politik pada Tahun 2025 :

Tabel 8.1 Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pendidikan politik yang dilaksanakan	n.a	n.a	n.a	n.a	18	21
2	Jumlah pendidikan politik yang direncanakan	n.a	n.a	n.a	n.a	10	10
3	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2025

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2025 ada 10 kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal :

1. 22 Januari 2025 pelaksanaan kegiatan bersama 10 partai politik dalam rangka evaluasi kegiatan 2024 di BPK RI perwakilan Jawa Tengah.
2. 25 Februari 2025 di Omah Kebon, pelaksanaan kegiatan dengan tema “Upaya menciptakan harkamtibmas yang aman dan kondusif pasca Pemilu/ Pilkada 2024 sertaantisipasi gangguan kamtibmas menjelang bulan Ramadhan/Idul Fitri”.
3. 22 Maret 2025 di Aula Kecamatan Temanggung, pelaksanaan kegiatan dengan tema “Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya bagi Masyarakat”.
4. 1 Juni 2025 di Pendopo Pengayoman Temanggung, Pelaksanaan kegiatan Diskusi Publik Hari Lahir Pancasila (Seminar Nasional dalam rangka Hari Lahir Pancasila dengan peserta 500 orang
5. 14 Juni 2025 di SMK N 1 Temanggung Pelaksanaan Pendidikan Politik dalam rangka sosialisasi bertemakan Pembumian Nilai-nilai Pancasila.
6. 18 Juni 2025 di Jambu Klutuk Resto Pelaksanaan Pendidikan Politik untuk guru Pembina SLTP yang berasal dari kecamatan Bulu, Parakan, Ngadirejo, Bejen, Tretep, dan Wonoboyo.
7. 17 Juli 2025 Pembinaan Kemasyaratan di Desa Mergowati
8. 21 Agustus 2025 Penanaman nilai Universal Agama & Karakter Bangsa di SMA 2 Temanggung
9. 1 September 2025 kegiatan edukasi politik di SMK GANESHA
10. 1 September 2025 kegiatan edukasi politik di SMK Swadaya Temanggung.

Pada triwulan IV Tahun 2025 ada 11 kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal:

1. 16 Oktober 2025 Pelaksanaan Kegiatan kaukus perempuan parlement bagi perempuan di Balai Kelurahan Giyanti di isi oleh Ibu Siti Margono dan Bpk Kaban Kesbangpol dengan jumlah peserta 40 orang
2. 16 Oktober 2025 Pelaksanaan Kegiatan kaukus perempuan parlement bagi perempuan di Balai Desa Pengilon Kecamatan Bulu di isi oleh Ibu Umi Fadilah dan Ibu Sekban Kesbangpol dengan jumlah peserta 40 orang
3. 17 Oktober 2025 Pelaksanaan Kegiatan kaukus perempuan parlement bagi perempuan di Balai Desa Ketitan Kecamatan Jumo di isi oleh Ibu Elynawati dan Kaban Kesbangpol dengan jumlah peserta 40 orang
4. 17 Oktober 2025 Pelaksanaan Kegiatan kaukus perempuan parlement bagi perempuan di Balai Desa Pateken Kecamatan Wonoboyo di isi oleh Ibu

- Indah Cahyani dan Ibu Sekban Kesbangpol dengan jumlah peserta 40 orang
5. 20 Oktober 2025 Pelaksanaan Kegiatan kaukus perempuan parlement bagi perempuan di Aula Kecamatan Kranggan di isi oleh Ibu Herlina D.P dan Bpk Kaban Kesbangpol dengan jumlah peserta 40 orang
 6. 20 Oktober 2025 Pelaksanaan Kegiatan kaukus perempuan parlement bagi perempuan di Balai Desa Ngabean Kecamatan Candirot di isi oleh Ibu Tri Eko Wasti dan Ibu Sekban Kesbangpol dengan jumlah peserta 40 orang
 7. 21 Oktober 2025 Pelaksanaan Kegiatan kaukus perempuan parlement bagi perempuan di Aula Kecamatan Temanggung di isi oleh Ibu Dwi Linda Wati dan Bpk Knban Kesbangpol dengan jumlah peserta 40 orang
 8. 21 Oktober 2025 Pelaksanaan Kegiatan kaukus perempuan parlement bagi perempuan di Balai Desa Campurejo Tretep di isi oleh Ibu Panca Dewi dan Ibu Sekban Kesbangpol dengan jumlah peserta 40 orang
 9. 30 Oktober 2025 Pelaksanaan Kegiatan kaukus perempuan parlement bersama FORKOPIMDA dan Bazar UMKM “Perempuan Berdaya” di Pendopo Pengayoman di isi oleh Bupati, FORKOPIMDA, Pimpinan OPD prempaun yang terkait dan 9 Anggota Kaukus perempuan dengan jumlah peserta 200 orang
 10. 3 November 2025 Pelaksanaan Kegiatan kaukus perempuan parlement bagi perempuan di Ponpes Darul Aman di isi oleh Ibu Umi Tsuwaibah dan Kaban Kesbangpol dengan jumlah peserta 40 orang.
 11. 29 Desember 2025 Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan politik di Kecamatan Parakan pada acara Latihan Kader Dasar (LKD) Fatayat NU dengan jumlah peserta 54 orang.

Sehingga sampai dengan triwulan IV tahun 2025 terdapat 21 pendidikan politk. Faktor pendorong indikator persentase pelaksanaan pendidikan politik adalah banyak kegiatan yang mendukung dalam menyampaikan pendidikan politik kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diantaranya adalah dengan memberikan informasi/pengetahuan kepolitikan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol dan kegiatan lembaga lain yang melibatkan Badan Kesbangpol.

9. PERSENTASE ORMAS YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. (UU Nomor 17 Tahun 2013)

Pembinaan terhadap ormas dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan dan keanggotaan Ormas. Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan dihitung dengan rumus jumlah organisasi masyarakat yang mendapat pembinaan dibagi jumlah organisasi masyarakat keseluruhan dikalikan 100%.

Tabel 9.1 Persentase Ormas Yang Mendapatkan Pembinaan

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat pembinaan	n.a	n.a	n.a	n.a	26	60
2	Jumlah organisasi masyarakat keseluruhan	n.a	n.a	n.a	n.a	143	192
3	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	n.a	n.a	n.a	n.a	18,18	31,25

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2025

Data yang disajikan bersifat akumulatif mulai tahun 2024 sampai dengan 2026. Pada triwulan III tahun 2025 organisasi masyarakat yang telah mendapat pembinaan berasal dari tahun 2024 sebanyak 26 ormas dan tahun 2025 sebanyak 34 ormas. Dengan uraian sbb :

Data seluruh ormas sejumlah 192 ada pada link :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Juox7duOr8TSf_PNsRv9MIqRy0aKrla5/edit?usp=sharing&ouid=115850708889327499587&rtpof=true&sd=true

PEMBINAAN ORMAS TAHUN 2024

1. Muhammadiyah

2. Nahdatul Ulama

3. FKDM, dan

4. MUJ

5. FKUB

6. Karang Taruna kecamatan se Kabupaten 31 Desember 2024

7. Tunas Patria 12 Mei 2024

8. KNPI 19 Mei 2024

9. Senkom 19 Mei 2024

10. Fatayat NU 19 Mei 2024

11. GRIB Jaya 19 Mei 2024

12. UMRI, 19 Mei 2024

13. Pemuda Muhammadiyah pada 19 Mei 2024

14. Muslimat NU

15. Aisyiah

16. Nasyiatul Aisyiah

17. LDII
18. MTA

19. Banser

20. KOKAM

21. Rifaiyah, dan

22. BAMAG dalam kegiatan pengukuhan FKUB dan penyampaian pendidikan politik 'Cipta Kondisi Menuju Pilkada Yang Sejuk Dan Damai'

23. GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) 28 Oktober 2024

24. HMI 28 Oktober 2024(himpunan mahasiswa islam)

25. PMII 28 Oktober 2024 (pegerakan mhs islm indo)

26. IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) 28 Oktober 2024

Tabel 9.2 Pembinaan Ormas Tahun 2025

No	2025 TW I	
	Nama ORMAS	Tanggal Pembinaan
1	Gerakan Bakti Cendana (GBC) Kabupaten Temanggung	09 Januari 2025
2	Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional (PERMADANI) Kabupaten Temanggung	13 Januari 2025
3	Yayasan Miftakhul Jannah Kabupaten Temanggung	13 Januari 2025
4	Pemuda Katolik Komisariat Cabang Temanggung	21 Januari 2025
5	DPC Tiara Kusuma Kabupaten Temanggung	10 Februari 2025
6	Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya Kabupaten Temanggung (GRIP)	04 Maret 2025
7	Komunitas Purnabakti Kepala Desa dan Lurah Seluruh Indonesia (KOMPAKDESI) Kabupaten Temanggung	21 Maret 2025
8	Yayasan Atap Perempuan Kabupaten Temanggung	25 Maret 2025

No	2025 TW II	
	Nama ORMAS	Tanggal Pembinaan
1	Dewan Pimpinan Daerah Satuan Kerja Kesejahteraan Prajurit (SKKP) Kabupaten Temanggung	25 April 2025
2	Dewan Pimpinan Cabang Lindu Aji Kabupaten Temanggung	14 Mei 2025
3	Penerus Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia Yon Serna Veteran Trikora-Bela Negara Kabupaten Temanggung	19 Mei 2025
4	Gerakan Anti Narkotika Indonesia (GANISA) Kabupaten Temanggung	21 Mei 2025
5	Dewan Pimpinan Daerah Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (DPD BAMAGNAS) Kabupaten Temanggung	26 Mei 2025
6	Komunitas Difabel Daksa Temanggung (KDDT) Kabupaten Temanggung	26 Mei 2025
7	Perkumpulan Bina Akses Cabang Kabupaten Temanggung	02 Juni 2025
8	Jam'iyah Mudarosatil Qur'an Lil Hafizhat (JMQH) Kabupaten Temanggung.	02 Juni 2025
9	Perkumpulan Rumah Juang Rampas Kabupaten Temanggung.	11 Juni 2025
10	Komunitas Cobra Bodyguard Kabupaten Temanggung	23 Juni 2025

No	2025 TW III	
	Nama ORMAS	Tanggal Pembinaan
1	Komunitas Penyanyi Toea Kabupaten Temanggung	09 Juli 2025
2	Paguyuban Pedagang Sayur Menoreh Pasar Legi Parakan	14 Juli 2025
3	Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia (IPeKB)	14 Juli 2025
4	Gerakan Anti Narkotika Indonesia (GANISA) Kabupaten Temanggung.*	18 Juli 2025
5	Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Temanggung	30 Juli 2025
6	Gerakan Anti Narkotika Indonesia (GANISA) Kabupaten Temanggung.*	9 Agustus 2025

7	Yayasan Gagasan Muda Cemerlang Kabupaten Temanggung.	9 Agustus 2025
8	Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Temanggung (FKMPT) Kabupaten Temanggung.	9 Agustus 2025

No	2025 TW IV	
	Nama ORMAS	Tanggal Pembinaan
1	Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Tmg (FKMPT)	15 Oktober 2025
2	Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)	15 Oktober 2025
3	Pengurus Daerah Ikatan Dai Indonesia (PD IKADI)	17 Oktober 2025
4	PPDFI (Perkumpulan disabilitas fisik indonesia)	1 Desember 2025
5	Yayasan Almubarak Diwek Bojonegoro	9 Desember 2025
6	Yayasan Alkafy Mubarak Parakan	9 Desember 2025
7	Perkumpulan Bina Akses Cabang Kabupaten Temanggung	12 Desember 2025
8	DPD II Pengajian Al Hidyah	30 Desember 2025

Terdapat 30 ormas yang terhitung dalam penambahan ormas yang mendapat pembinaan di tahun 2025 karena GANISA mendapatkan 3 kali pembinaan, Bina Akses 2 kali dan FKMPT 2 kali. Faktor pendorong indikator Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan adalah banyak kegiatan yang mendukung dan melibatkan organisasi masyarakat di Kab Temanggung dan antusiasme dari organisasi masyarakat tinggi.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diantaranya adalah penguatan pembinaan kepada organisasi masyarakat dengan melibatkan pada event-event yang ada di Kesbangpol.

10. JUMLAH KEJADIAN KONFLIK SARA

Definisi operasional Jumlah Kejadian Konflik SARA yaitu banyaknya benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu yang didasarkan pada sentimen indentities yang menyangkut keturunan, agama, kesukuan dan golongan.

Jumlah kejadian konflik SARA adalah ukuran yang digunakan untuk memantau hubungan antar sesama umat beragama yang dilandasi pada toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai sehingga dapat membentuk hubungan berbangsa dan bernegara dengan baik dan dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan. Tidak adanya kejadian konflik SARA maka dapat diinterpretasikan bahwa telah tingginya tingkat toleransi dan upaya dalam deradikalisasi telah berhasil.

**Tabel 10.1 Jumlah Kejadian Konflik SARA
Triwulan IV Tahun 2025**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Target jumlah kejadian konflik SARA	n.a	n.a	n.a	n.a	8	8
2	Jumlah kejadian konflik SARA	n.a	n.a	n.a	n.a	1	2

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2025

Jumlah kejadian konflik SARA merupakan IUP yang dihitung dengan target menurun mulai tahun 2025 s.d 2045. Dengan target akhir 0 (nol) kejadian pada tahun 2045.

- 1. Konflik Internal GPDI Ngadirejo terkait dualisme kepemimpinan di GPDI Ngadirejo pada bulan Februari 2025
- 2. Konflik internal gereja GPDI Gosyen Kecamatan Kaloran pada bulan Desember 2025

Faktor pendorong dalam menekan jumlah kejadian konflik SARA yaitu adanya edukasi dan pemahaman tentang keberagaman, penguatan sikap toleransi dan saling menghormati, penegakan hukum yang tegas, penerapan pendidikan karakter, serta pemeliharaan persatuan dan kesatuan.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menekan konflik SARA :

- 1. Melaksanakan monitoring dinamika situasi sosial politik ekonomi dan keamanan daerah
- 2. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat
- 3. Mewujudkan interaksi sosial melalui kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan guna harmonisasi elemen masyarakat
- 4. Penguatan koordinasi antar kelembagaan baik lembaga vertikal maupun horisontal
- 5. Mengoptimalkan komunitas intelijen daerah

11. PERSENTASE KOORDINASI DETEKSI DINI KONFLIK DI MASYARAKAT

Koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat merupakan upaya kerja sama antara pemerintah, lembaga terkait, tokoh agama, dan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi konflik secara dini agar dapat dicegah sebelum konflik membesar. BANKESBANGPOL koordinasi deteksi dini dengan Unsur FORKOMPIMDA. FORKOPIMDA terdiri dari 6 personil yaitu Bupati, Ketua DPRD, Kepala Kodim, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Pengadilan Negeri masing-masing mempunyai tupoksi sendiri-sendiri dan tidak

semua kegiatan didatangi 6 personil tersebut namun 7 kegiatan dari setiap personil FORKOPIMDA memiliki keterkaitan yang di paparkan pada tabel di bawah ini.

Rumus penghitungan persentase koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat yaitu Jumlah koordinasi deteksi dini konflik yang dilaksanakan dibagi jumlah koordinasi deteksi dini konflik yang direncanakan.

Tabel 11.1 Persentase Koordinasi Deteksi Dini Konflik Di Masyarakat

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah koordinasi deteksi dini konflik yang dilaksanakan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	126
2	Jumlah koordinasi deteksi dini konflik yang direncanakan	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	84
3	Persentase koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	100

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2025

Link data dukung kegiatan :
<https://drive.google.com/file/d/1Qn0yUB1DP3YifRR6UKPi53f4oqqqgolyo/view?usp=sharing>

Pelaksanaan koordinasi deteksi dini sampai dengan triwulan IV tahun 2025 sebanyak 84 kegiatan dengan data dukung terlampir.

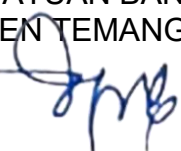
Faktor pendorong persentase koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat yaitu telah terjalin komunikasi yang baik dalam pertukaran informasi deteksi dini konflik di masyarakat, partisipasi aktif tim kewaspadaan dini daerah dan komunitas intelijen daerah,

Upaya dalam mencapai persentase koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat yaitu melibatkan admin forkompimda dalam pengumpulan data, melaksanakan rapat koordinasi, forum diskusi, dan sistem pelaporan untuk meningkatkan kewaspadaan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui dialog, forum, dan sistem peringatan dini.



Temanggung, 2 Januari 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG


Djuoko PRASETYONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19721126 199203 1 002

LAMPIRAN

Kegiatan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	
	
	
	
	
Pelaksanaan pendidikan politik	
	



Pembinaan ormas



Forum Kerukunan Umat Beragama



Koordinasi pencegahan & penanganan konflik

